



EROSI NILAI PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI MODERN: TANTANGAN IDEOLOGI BANGSA DI TENGAH PERUBAHAN ZAMAN

Adrian Kemhay¹

¹Universitas Khairun, Ternate

E-mail: adriankemhay@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Demokrasi Indonesia secara konseptual dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang tidak hanya menekankan kedaulatan rakyat, tetapi juga berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, dalam perkembangan demokrasi modern, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena erosi nilai Pancasila dalam sistem demokrasi modern Indonesia serta menganalisis tantangan ideologi bangsa di tengah perubahan zaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema demokrasi dan Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia cenderung mengalami pergeseran dari demokrasi berbasis nilai menuju demokrasi prosedural, yang ditandai dengan maraknya politik uang, politik identitas, polarisasi sosial, serta degradasi etika politik, khususnya di era digital. Studi kasus pemilu menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi, meskipun memperluas partisipasi politik, juga berpotensi memperlemah persatuan dan nilai kebangsaan apabila tidak dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi Pancasila melalui penguatan pendidikan nilai, literasi politik, dan etika demokrasi guna menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia yang berkeadaban dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Nilai Pancasila, Demokrasi Modern, Ideologi Bangsa, Pemilu Indonesia.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai sumber etika dan moral dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurut Kaelan,

Pancasila memiliki kedudukan sebagai norma dasar negara (*grundnorm*) yang seharusnya menjiwai seluruh aspek kehidupan ketatanegaraan, termasuk praktik demokrasi dan penyelenggaraan kekuasaan politik (Kaelan, 2013).

Dalam kerangka konstitusional, demokrasi Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum, partisipasi politik warga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa demokrasi konstitusional tidak boleh dipahami semata-mata sebagai prosedur politik, melainkan harus berlandaskan pada nilai-nilai etika, moral, dan hukum agar tidak kehilangan substansi keadilan dan kemanusiaan (Asshiddiqie, 2015).

Namun, dalam praktik demokrasi modern di Indonesia, terdapat berbagai fenomena yang menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Politik uang, pragmatisme elite, polarisasi politik, serta menguatnya politik identitas menjadi tantangan serius dalam kehidupan demokrasi. Vedi R. Hadiz mengemukakan bahwa demokrasi Indonesia pasca-reformasi cenderung mengalami dominasi kepentingan oligarki, sehingga demokrasi berjalan secara formal-prosedural tetapi miskin nilai dan substansi keadilan sosial (Hadiz, 2017). Kondisi ini mencerminkan adanya erosi nilai Pancasila dalam sistem demokrasi yang semakin kompetitif dan transaksional.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media digital turut memengaruhi dinamika demokrasi modern. Teknologi digital membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, ujaran kebencian, dan menurunnya etika politik di ruang publik. Yanuar Nugroho menyatakan bahwa demokrasi digital tanpa fondasi nilai yang kuat berpotensi melemahkan kohesi sosial dan mengancam persatuan bangsa (Nugroho, 2019). Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila seharusnya berperan sebagai filter etis dalam praktik demokrasi di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai erosi nilai Pancasila dalam sistem demokrasi modern menjadi penting untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi Indonesia serta mengkaji tantangan ideologi bangsa di tengah perubahan zaman. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperkuat kembali demokrasi Pancasila yang tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga berakar pada nilai moral, etika, dan keadilan sosial.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji demokrasi dan Pancasila berdasarkan norma, nilai, serta prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan pemikiran para ahli. Sementara itu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena erosi nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi modern di Indonesia. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap makna, konsep, dan konteks suatu permasalahan sosial secara mendalam.

2. Populasi dan Sampel/Subjek Penelitian

Karena penelitian ini bersifat normatif-kualitatif, penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel dalam arti statistik. Subjek penelitian berupa **bahan kajian** yang terdiri atas dokumen dan sumber tertulis, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan demokrasi,
- buku teks dan karya ilmiah para ahli mengenai Pancasila dan demokrasi,
- serta artikel jurnal yang relevan dengan topik erosi nilai Pancasila dalam demokrasi modern.

Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber terhadap fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen resmi negara. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data konseptual dan teoritis yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila, ideologi bangsa, serta tantangan demokrasi di era modern. Menurut Zed (2014), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dalam penelitian normatif karena memungkinkan peneliti menganalisis gagasan dan pemikiran secara mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian;
2. Penyajian data, dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti konsep demokrasi Pancasila, bentuk erosi nilai Pancasila, dan tantangan ideologi bangsa;
3. Penarikan kesimpulan, dengan menginterpretasikan data secara kritis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi demokrasi modern Indonesia serta sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih diimplementasikan dalam praktik demokrasi.

Pembahasan

1. Konsep Demokrasi Pancasila dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang khas Indonesia, karena berakar pada nilai-nilai ideologis Pancasila dan bukan sekadar adopsi dari demokrasi liberal Barat. Demokrasi ini menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama, namun pelaksanaannya dibatasi oleh nilai moral, etika, dan hukum yang bersumber dari Pancasila. Kaelan menegaskan bahwa demokrasi Pancasila menolak individualisme ekstrem dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat menjadi ciri utama dalam proses pengambilan keputusan politik, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang adil, inklusif, dan mencerminkan kehendak bersama. Namun, dalam praktik demokrasi modern, prinsip musyawarah sering kali tergeser oleh mekanisme voting yang bersifat kompetitif dan mayoritarian, sehingga nilai kebersamaan dan persatuan cenderung melemah.

2. Erosi Nilai Pancasila dalam Praktik Demokrasi Modern

Perkembangan demokrasi modern di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari demokrasi berbasis nilai menuju demokrasi prosedural. Demokrasi sering kali dipahami sebatas pelaksanaan pemilu secara rutin, tanpa memperhatikan kualitas etika dan moral para aktor politik. Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa demokrasi yang hanya berfokus pada prosedur berpotensi melahirkan tirani mayoritas dan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak dibingkai oleh nilai konstitusional dan etika Pancasila.

Salah satu bentuk nyata erosi nilai Pancasila adalah maraknya politik uang dalam proses pemilihan umum. Praktik ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan

kemanusiaan, karena mengubah hak politik rakyat menjadi komoditas transaksi. Selain itu, politik uang juga merusak prinsip kejujuran dan integritas dalam demokrasi, sehingga pemimpin yang terpilih tidak selalu mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara substansial.

Fenomena lain yang menunjukkan erosi nilai Pancasila adalah menguatnya politik identitas. Penggunaan isu suku, agama, ras, dan golongan dalam kontestasi politik berpotensi memecah persatuan bangsa dan bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Vedi R. Hadiz menilai bahwa politik identitas sering dimanfaatkan oleh elite politik sebagai alat mobilisasi massa demi kepentingan kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan kepentingan publik secara luas.

3. Studi Kasus: Pemilu, Demokrasi Digital, dan Polarisasi Sosial dalam Perspektif Nilai Pancasila

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Secara normatif, pemilu dimaksudkan sebagai sarana perwujudan demokrasi Pancasila yang menjunjung nilai keadilan, persamaan hak, dan partisipasi rakyat secara bermartabat. Namun, dalam praktik demokrasi modern, pemilu di Indonesia menunjukkan berbagai dinamika yang mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai dari substansi Pancasila menuju demokrasi yang bersifat prosedural dan transaksional.

Salah satu fenomena yang menonjol dalam pelaksanaan pemilu adalah meningkatnya polarisasi politik di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan politik yang seharusnya menjadi bagian wajar dari demokrasi justru berkembang menjadi konflik sosial yang tajam. Menurut Vedi Hadiz (2017), polarisasi politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik mobilisasi massa oleh elite politik yang memanfaatkan sentimen identitas dan emosi publik demi kepentingan elektoral. Kondisi ini mencerminkan melemahnya nilai persatuan dan kebersamaan sebagaimana diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memperkuat polarisasi tersebut. Media digital memungkinkan penyebaran informasi politik secara cepat dan luas, namun sering kali tidak diimbangi dengan literasi politik dan etika digital yang memadai. Yanuar Nugroho (2019) menjelaskan bahwa demokrasi digital memiliki dua sisi, yaitu sebagai sarana peningkatan partisipasi publik, sekaligus sebagai ruang subur bagi disinformasi dan manipulasi opini publik. Ketika ruang digital dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian, demokrasi kehilangan dimensi rasionalitas dan musyawarah yang menjadi ciri demokrasi Pancasila.

Selain polarisasi, politik identitas juga menjadi fenomena penting dalam studi kasus

pemilu di Indonesia. Identitas agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu sering digunakan sebagai alat mobilisasi politik untuk meraih dukungan elektoral. Bahtiar Effendy (2018) menilai bahwa politisasi identitas berpotensi mereduksi makna demokrasi menjadi sekadar pertarungan mayoritas dan minoritas, serta mengabaikan prinsip keadilan dan persatuan. Praktik ini jelas bertentangan dengan Pancasila yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai alat konflik politik.

Fenomena lain yang mencerminkan erosi nilai Pancasila dalam pemilu adalah politik uang. Politik uang mengubah hak pilih warga negara menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya kebebasan memilih yang didasarkan pada kesadaran politik, bukan tekanan atau imbalan materi (Budiardjo, 2008). Politik uang tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga berdampak pada rendahnya kualitas kepemimpinan politik yang dihasilkan.

Studi kasus pemilu ini menunjukkan bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada absennya mekanisme demokratis, melainkan pada krisis nilai dan etika dalam praktiknya. Jimly Asshiddiqie (2015) menegaskan bahwa demokrasi konstitusional harus dibingkai oleh nilai moral dan etika kebangsaan agar tidak berubah menjadi demokrasi yang bebas tetapi kehilangan arah. Tanpa internalisasi nilai Pancasila, demokrasi berpotensi melahirkan konflik sosial, ketidakadilan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Dengan demikian, studi kasus pemilu, demokrasi digital, dan polarisasi sosial menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi modern. Pemilu seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kompetisi politik lima tahunan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik dan penguatan karakter kebangsaan. Penguatan literasi politik, etika digital, serta pemahaman nilai Pancasila menjadi langkah strategis untuk mengembalikan demokrasi Indonesia pada jati dirinya sebagai demokrasi yang berkeadaban dan berorientasi pada kepentingan bersama.

4. Kritik terhadap Praktik Demokrasi Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikritisi bahwa demokrasi Indonesia saat ini cenderung mengalami krisis nilai, bukan krisis prosedur. Secara formal, mekanisme demokrasi berjalan dengan baik, namun secara substansial nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aktor politik maupun masyarakat. Demokrasi sering kali dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, sehingga mengabaikan tanggung jawab moral dan etika publik.

Selain itu, pendidikan Pancasila dalam praktiknya masih lebih menekankan aspek kognitif daripada pembentukan karakter dan kesadaran kritis. Akibatnya, Pancasila dipahami sebatas hafalan sila, bukan sebagai pedoman hidup dan etika demokrasi. Kondisi ini berkontribusi terhadap melemahnya daya tahan Pancasila dalam menghadapi tantangan demokrasi modern yang semakin kompleks.

5. Upaya Penguatan Kembali Nilai Pancasila dalam Demokrasi

Menghadapi erosi nilai Pancasila dalam sistem demokrasi modern, diperlukan upaya serius untuk merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penguatan pendidikan Pancasila yang kontekstual dan kritis menjadi langkah strategis untuk menanamkan nilai demokrasi yang beretika dan berkeadaban. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus diarahkan untuk memperkuat literasi politik, partisipasi yang sehat, serta penyebaran nilai persatuan dan keadilan sosial.

Demokrasi Indonesia perlu kembali diletakkan pada kerangka demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi tidak sekadar menjadi mekanisme kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia secara normatif berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan kedaulatan rakyat melalui mekanisme prosedural, tetapi juga menuntut adanya etika, moralitas, serta tanggung jawab sosial dalam setiap praktik kehidupan demokrasi. Namun, dalam konteks demokrasi modern, implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Erosi nilai Pancasila dalam sistem demokrasi modern tercermin dalam berbagai fenomena, seperti politik uang, polarisasi politik, menguatnya politik identitas, serta rendahnya etika dalam komunikasi politik, khususnya di ruang digital. Praktik demokrasi yang cenderung berorientasi pada aspek prosedural dan kepentingan jangka pendek menunjukkan adanya krisis nilai, di mana demokrasi dijalankan tanpa penghayatan yang mendalam terhadap prinsip keadilan, persatuan, dan musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

Studi kasus pemilu dan dinamika demokrasi digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi, meskipun membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, juga berpotensi memperparah fragmentasi sosial apabila tidak dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tantangan utama demokrasi Indonesia saat ini bukan terletak pada lemahnya mekanisme demokratis, melainkan pada melemahnya internalisasi nilai ideologi bangsa dalam praktik demokrasi sehari-hari.

Dengan demikian, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia. Revitalisasi pendidikan Pancasila yang kontekstual, peningkatan literasi politik dan etika digital, serta komitmen aktor politik terhadap nilai moral dan konstitusional merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berakar pada jati diri bangsa. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila diharapkan mampu berkembang secara sehat, berkeadaban, dan berorientasi pada kepentingan bersama di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Bahtiar. (2018). *Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Hadiz, Vedi R. (2017). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Izhatullaili, I. (2025). Kesalahan Fonologis dalam Komunikasi Antar-Etnis di Kota Kupang: Implikasi Pedagogis untuk Guru Bahasa Indonesia. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 136-147.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9-14.
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., Nassa, D. Y., & Doko, M. M. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Canva Pada Materi Kebinekaan Indonesia Kelas VII DI SMP Muhammadiyah Kupang. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 1-8.
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., Nassa, D. Y., & Doko, M. M. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Canva Pada Materi Kebinekaan Indonesia Kelas VII DI SMP Muhammadiyah Kupang. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 1-8.
- Mas'ud, F., Kale, D. Y. A., Gero, H. M. E., Kolianan, J. B., Sabariman, H., & Peranginangin, I. I. (2025). Studi Masyarakat Indonesia. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Kale, D. Y. A., & Wibowo, I. (2025). Civic Resilience di Era VUCA: Peran Literasi Bahasa dalam Pembentukan Warga Negara Reflektif di Kota Kupang. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 32-46.
- Mas' ud, F., & Wibowo, I. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. *Media Sains*, 25(1), 27-31.
- Naufal, Muhammad Rizky. (2020). Demokrasi Konstitusional dan Tantangan Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 5(2), 145–160.
- Nugroho, Yanuar. (2019). Demokrasi Digital, Media Sosial, dan Tantangan Kohesi Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1–15.
- Nurdin. (2016). Rekonstruksi Nilai Demokrasi dalam Perspektif Ideologi Pancasila. *Jurnal Filsafat Pancasila*, 6(2), 87–102.
- Prasetyo, Aditya. (2023). Partisipasi Publik dan Keadilan Sosial dalam Demokrasi Modern Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 55–70.
- Santoso, Topo. (2013). Etika Politik dan Demokrasi Berbasis Nilai. *Jurnal Etika dan Kehidupan Berbangsa*, 4(1), 23–38.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.